



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DOI:

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/4141>

EFEKTIVITAS ANGKUTAN UMUM DALAM TRAYEK TETAP DAN TERATUR DI KABUPATEN BANYUMAS

Nuki Lestari Wahyuningtyas¹, Denok Kurniasih², Tobirin³

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik-Administrasi Publik, Universitas

Jenderal Soedirman Purwokerto^{1,2,3}

nuki.wahyuningtyas@mhs.unsoed.ac.id,

denok.kurniasih@unsoed.ac.id, tobirin@unsoed.ac.id

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received date: 12 November 2023

Revised date: 15 November 2023

Accepted date: 14 November 2023

ABSTRACT

Transportation or freight is a very important area for people's lives. Transportation aims to be a means of moving people that is useful for moving from one place to another, especially for people who do not have private vehicles. The need for transportation facilities and infrastructure is very necessary. The aim of this research is to determine the effectiveness of public transport arrangements on fixed and regular routes in Banyumas Regency. This research uses a qualitative descriptive approach with a survey method through field observations. The effectiveness of the program in this research uses indicators; 1) comfort; 2) capacity; 3) punctuality; 3) price; and 5) overlapping routes. The results of research on public transport services on fixed and regular routes in Banyumas Regency are quite effective based on indicators of comfort, capacity, punctuality and price. The prices or tariffs set do not harm operators and also do not burden people who use rural or urban public transport services. Meanwhile, based on the route overlap indicator, there is overlap in transport routes in urban areas traversed by the Trans Banyumas bus route.

Keywords: effectiveness, transportation, routes

ABSTRAKSI

Transportasi atau pengangkutan adalah salah satu bidang yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Pengangkutan bertujuan untuk sarana penggerak manusia yang berguna untuk berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Kebutuhan akan sarana dan prasarana pengangkutan ini sangat diperlukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penataan angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode survei melalui observasi lapangan. Efektivitas program pada penelitian ini menggunakan indikator; 1) kenyamanan; 2) kapasitas; 3) ketepatan waktu; 3) harga; dan 5) tumpang tindih trayek. Hasil penelitian pelayanan angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur di Kabupaten Banyumas sudah cukup efektif jika berdasarkan indikator kenyamanan, kapasitas, ketepatan waktu dan harga. Harga atau tarif yang ditetapkan tidak merugikan operator serta tidak pula membebani masyarakat pengguna jasa angkutan umum pedesaan maupun perkotaan. Sedangkan berdasarkan indikator tumpang tindih trayek, terjadi tumpang tindih trayek angkutan di wilayah perkotaan yang dilalui oleh rute bus Trans Banyumas.

Kata Kunci: efektivitas, transportasi, trayek.

INTRODUCTION

Transportasi ialah salah satu kebutuhan

sarana bagi sebagian besar masyarakat untuk

melaksanakan kegiatannya.

Transportasi

diwujudkan dalam bentuk angkutan. Pengangkutan terbagi dalam pengangkutan orang dan pengangkutan barang yang diperuntukannya untuk umum atau pribadi. Transportasi sebagai sistem dari lalu lintas di daerah baik di desa maupun di kota saat ini sangat berkembang mengikuti kebutuhan penduduk untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain (Suhargon, 2021). Unsur terpenting dalam transportasi ialah pemindahan dan pergerakan barang atau penumpang. Angkutan umum merupakan mode transportasi untuk mengangkut orang atau barang dari tempat asal ke tempat tujuan dengan dikenakan tarif perjalanan (Oriwarda, *et al.*, 2022).

Transportasi sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena keadaan geografis Indonesia untuk menjangkau seluruh wilayah. Hal yang dibutuhkan berkaitan dengan alat transportasi ialah adanya kenyamanan dan keamanan serta kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor yaitu industri, perdagangan, pariwisata serta di sektor pendidikan (Suhargon, 2021).

Lalu lintas angkutan jalan di Indonesia dan juga sarana dan prasarannya belum tertata secara baik dan rapih. Lalu lintas dan angkutan jalan tidak berkaitan dan angkutan umum, saja, akan tetapi berkaitan juga dengan sesuatu contohnya seperti pengemudi, sarana dan prasarana pendukung pengelolaan pengangkutan. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat (Harahap, 2019).

Permasalahan transportasi baik di wilayah pedesaan maupun di wilayah perkotaan, terutama yang terkait dengan moda transportasi massal seperti angkutan umum, sangat penting bagi kehidupan sebuah wilayah karena menjadi tulang punggung bagi adanya pergerakan mayoritas masyarakat ketika melakukan aktivitas baik di berbagai bidang (Hariyono dan Prawesthi, 2015).

Berbagai moda angkutan umum menjadi pilihan bagi beberapa wilayah salah satunya di Kabupaten Banyumas yang saat ini moda angkutan umum sudah cukup bervariasi seperti adanya Bus Rapid Transit (BRT) Trans Banyumas dan Trans Jateng serta moda angkutan desa yang kesemua itu masih terbatas berbasis pada jalan. Penyelenggaraan dan penyediaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimum seperti keamanan,

keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan. Akan tetapi semua unsur itu belum terpenuhi untuk beberapa angkutan umum dalam trayek di Kabupaten Banyumas.

Permasalahan berkaitan pada angkutan umum yaitu antara lain perencanaan trayek dan pelayanan angkutan umum yang belum memuaskan masyarakat. Fenomena tersebut membuktikan tentang adanya penyelenggaraan angkutan umum (*public transport*) yang belum efisien dan efektif. Permasalahan trayek menjadi permasalahan pokok dalam pengelolaan angkutan umum transportasi jalan. Penataan trayek yang kurang matang akan bisa mempersulit dalam pelaksanaan dilapangan. Trayek merupakan penetapan jalur rute pada ruas jalan tertentu yang dilewati oleh kendaraan angkutan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Ruas jalan yang berada pada suatu wilayah dan tersambung dengan wilayah kota lain di tetapkan dalam jaringan trayek. Ketika ruas jalan dilewati oleh beberapa angkutan umum dari berbagai jurusan jika *load factor* semakin menurun maka optimalisasi angkutan umum tersebut semakin berkurang. *Load factor* ialah perbandingan antara kapasitas terjual dengan kapasitas tersedia untuk satu perjalanan. Ruas jalan juga banyak di lalui selain oleh kendaraan angkutan umum juga bercampur dengan kendaraan pribadi yang menyebabkan semakin padat dan menimbulkan kemacetan (Subarto, *et al.*, 2015).

Hal tersebut juga ditemui di Kabupaten Banyumas, sehingga masyarakat menghadapi situasi lalu lintas jalan yang macet kemudian menimbulkan kerugian baik dari aspek waktu, penggunaan BBM serta berkurangnya pendapatan.

Kebijakan trayek angkutan umum dalam trayek belum terlaksana dengan baik dan harus segera dievaluasi. Setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah semestinya selalu dilakukan evaluasi dan tetap mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan publik. Kewenangan penertiban dan penindakan angkutan umum dalam trayek berada di bawah pengawasan pihak Satuan Lalu Lintas (Satlantas). Dinas Perhubungan Kabupaten dan kota hanya berwenang melengkapi sarana dan prasarana jalan, pengadaan rambu lalu lintas, pengawasan terminal dan sub terminal serta alat uji KIR (Suhargon, 2021).

Melalui berbagai permasalahan tersebut, dibutuhkan penelitian mengenai efektivitas dari

suatu program pemerintah, dalam hal ini ialah kartu tani. Efektivitas ialah untuk menguji atau mengetahui tentang kebermanfaatan suatu kebijakan tentang pelayanan masyarakat atau tentang pelaksana program pemerintahan (Hutagalung & Hermawan, 2018). Efektivitas bertujuan mengetahui hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Arfin, *et al.*, 2022).

Pengukuran efektivitas cukup sulit untuk dilakukan, akan tetapi efektivitas dapat dievaluasi dari berbagai sudut atau perspektif. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan hasil yang direncanakan dan hasil aktual yang ada di lapangan. Efektivitas penataan angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur dapat dikaji dengan 5 indikator yaitu 1) kenyamanan; 2) kapasitas; 3) ketepatan waktu; 3) harga; dan 5) tumpang tindih trayek.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, diperlukan penelitian untuk mengkaji efektivitas penataan angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur di Kabupaten Banyumas.

LITERATURE REVIEW

Transportasi Publik

Transportasi ialah bagian terpenting kehidupan sosial dan juga bagi sistem pemerintahan karena sebagai alat yang dipakai untuk memindahkan atau memindahkan barang atau penumpang dari satu tempat ke tempat lainnya (Rifusa, 2010). Kebutuhan akan pelayanan transportasi umum yang aman, nyaman dan terjangkau merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Transportasi publik merupakan sektor penunjang kegiatan ekonomi (sektor promosi) dan sektor yang memberikan pelayanan bagi pembangunan ekonomi (sektor jasa), seiring dengan pergerakan barang dan orang (Habibullah, 2022).

Sistem transportasi publik berperan terhadap pergerakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu tugas pemerintah adalah menyediakan pelayanan sistem transportasi publik yang baik, handal serta terjangkau oleh semua elemen masyarakat (Farhand, 2022). Sistem transportasi umum merupakan proses organisasi yang terdiri dari sistem transportasi umum (jaringan dan infrastruktur, tarif dan sistem tiket, informasi dan komponen pemasaran) dengan berbagai

operator yang melayani moda transportasi yang berbeda untuk meningkatkan kualitas layanan dan kinerja gabungan angkutan umum (Solecka & Žak, 2015).

Sistem transportasi merupakan seperangkat komponen yang saling mendukung dalam menyediakan transportasi. Sistem transportasi secara keseluruhan (makro) dapat diuraikan menjadi sejumlah sistem yang lebih kecil yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi (mikro). Sistem transportasi mikro terdiri dari sistem aktivitas, sistem jaringan infrastruktur transportasi, sistem pergerakan transportasi, dan sistem kelembagaan (Habibullah, 2022).

Angkutan Umum dalam Trayek Tetap dan Teratur

Angkutan umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Angkutan umum ialah moda transportasi publik yang terpenting dalam mendukung kegiatan dan mobilitas penduduk di berbagai wilayah. Pada beberapa negara berkembang jenis angkutan umum masih dikelola secara tradisional dan tidak berstruktur serta tidak terorganisasi dengan baik sehingga dalam perkembangannya menjadi tidak efisien dan tidak dapat mengakomodasi kepentingan publik (Hariyono dan Prawesthi, 2015).

Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau. Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan angkutan umum. Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan angkutan umum sebagai sarana transportasi publik dibutuhkan untuk memenuhi mobilitas masyarakat disuatu wilayah. Landasan hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan angkutan umum salah satunya ialah Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang penyusunan rencana jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/ kota. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap baik terjadwal maupun

tidak terjadwal. Ketersediaan sarana angkutan umum yang memadai bisa mempermudah aktivitas masyarakat. Penyelenggaraan angkutan umum yang efektif akan bisa menekan penggunaan kendaraan pribadi sebagai moda utama mobilitas pergerakan masyarakat (Hariyono dan Prawesthi, 2015).

Efektivitas

Efektivitas memiliki arti mampu mencapai tujuan yang direncanakan sebelumnya, yaitu mencapainya dalam kegiatan. Efektivitas sebuah program ialah ukuran tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan. Menurut Campell, efektivitas dapat dikatakan sebagai tingkat kemampuan lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya atau dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Ashari dan Hariyani, 2019).

Efektivitas ialah sebuah ketepatan antara *output* dengan tujuan yang ditetapkan. Jika hasil kegiatan lebih dekat dengan tujuan, efeknya akan lebih tinggi. Menurut Habibullah (2022) terdapat 5 indikator dalam mengukur efektivitas trayek angkutan umum yaitu:

1. Kenyamanan
2. Kapasitas
3. Ketepatan waktu
4. Harga
5. Tumpang tindih trayek

METHODS

Penelitian berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Pengumpulan data pada penelitian kualitatif berdaarkan pada hasil wawancara di lapangan yang dikaitkan dengan teori (Sugiyono, 2016).

Penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder yakni dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Data sekunder diperoleh dari observasi sekunder dan telaah dokumen terkait dengan penataan angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur di Kabupaten Banyumas. Teknik analisis yang

digunakan terdiri dari metode analisis deskriptif dan metode analisis perbandingan (*comparative analysis*) yang merupakan metode yang berkaitan erat dengan perencanaan yang dilakukan oleh negara, swasta, atau komunitas yang akan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat (Adhianti *et al.*, 2020).

RESULT AND DISCUSSION

Sektor transportasi memiliki peranan penting dalam merekatkan integrasi wilayah. Untuk mendukung aksesibilitas pergerakan masyarakat, ditetapkan jaringan trayek angkutan umum di Kabupaten Banyumas. Sistem angkutan umum di Kabupaten Banyumas terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan, yaitu trayek tetap dan teratur serta tidak dalam trayek tetap dan tidak teratur. Angkutan umum trayek tetap dan teratur terdiri dari trayek angkutan antar kota antar provinsi (AKAP), trayek angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), dan trayek angkutan pedesaan (Angdes) (Farhand, 2022).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan ngkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, terdiri dari:

1. Angkutan Kota atau Bus Kota;
2. Angkutan Perdesaan;
3. Angkutan Perbatasan;
4. Angkutan Khusus, yaitu angkutan karyawan, angkutan permukiman dan angkutan pemandu moda.

Perencanaan jaringan trayek angkutan umum perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Banyumas diharapkan akan dapat membuat masyarakat Kabupaten Banyumas beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke moda angkutan umum.

Efektivitas Pelayanan Angkutan Umum dalam Trayek Tetap dan Teratur

1. Kenyamanan

Indikator yang digunakan untuk mengukur suatu efektivitas adalah ialah kenyamanan. Ukuran kenyamanan atau kemudahan yang berinteraksi dengan situs atau penggunaan lahan dan kemudahan atau kesulitan mencapai situs melalui sistem jaringan transportasi.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh fakta bahwa angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur mudah untuk dijangkau oleh pengguna, yang terbukti dengan mudah ditemukannya halte di tempat strategis atau pusat aktivitas masyarakat itu sendiri, seperti di pasar tradisional dan pasar modern yang mayoritas menjadi pusat kegiatan masyarakat setiap harinya.

2. Kapasitas

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh tingkat kapasitas yang cukup efektif ini terlihat dari pernyataan narasumber yang menyebutkan bahwa angkutan umum di wilayah Kabupaten Banyumas sudah memenuhi kebutuhan dari jumlah penumpang yang bermakna cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas angkutan umum di Kabupaten Banyumas sudah cukup efektif untuk memenuhi jumlah penumpang. Selain itu indikator berdasarkan kapasitas ruang tunggu sudah sesuai dengan jumlah penumpang sesuai kapasitas halte yang tersedia.

3. Ketepatan Waktu

Efektivitas transportasi umum diukur dengan ketepatan waktu. Kecepatan akses penumpang berkaitan dengan kemudahan penumpang dalam melakukan perpindahan pergerakan dan pergantian antar moda khususnya pada lokasi transit yang tersedia (Rakhmatullah, *et al.*, 2022). Penempatan lokasi halte angkutan umum seringkali berada dalam jarak yang relatif dekat.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh ketepatan waktu tergolong cukup efektif yang dinyatakan keberangkatan dan kedatangan armada sangat efektif. Pengguna transportasi umum dalam menunggu cukup efektif. Artinya pengguna tidak perlu berlama-lama dalam menunggu bus, hanya terjadi di waktu padat saja, seperti di jam keberangkatan sekolah pagi hari dan di sore hari. Hal tersebut diduga karena kepadatan lalu lintas karena banyaknya kendaraan pribadi yang melintas, dan banyaknya angkutan yang beroperasi di lokasi yang sama.

4. Harga

Harga yang dibayarkan untuk angkutan umum di wilayah Kabupaten Banyumas masuk

kedalam kategori sangat efektif. Konsep keterjangkauan tarif dapat dicapai dengan adanya integrasi tarif. Tarif pelayanan dapat direduksi melalui mekanisme integrasi tarif. Integrasi tarif memiliki konsep menciptakan satu kesatuan layanan yang akan memberikan kemudahan akses berpindah moda dengan fitur yang memungkinkan untuk menggunakan moda yang berbeda dalam satu kali pembayaran dan tarif yang terintegrasi. Skema pembayaran dan tarif antarmoda yang dapat diterapkan seperti pembelian tiket di depan berdasarkan kebutuhan jumlah perjalanan dan pendapatan tambahan bagi operator apabila mampu meminimalisasi waktu perjalanan. Namun masih ditemukan tidak adanya integrasi tarif pada angkutan perdesaan di Kabupaten Banyumas, hal tersebut karena dilakukan dengan pembayaran tunai bukan seperti pada moda transportasi angkutan di wilayah perkotaan di Kabupaten Banyumas yang sudah dilakukan dengan menggunakan non tunai.

5. Tumpang tindih trayek

Penentuan trayek usulan didasari pada Matriks asal dan tujuan perjalanan serta besarnya bangkitan dan tarikan masing-masing zona, kemudian berdasarkan hasil pembebanan yang telah dilakukan maka diperoleh jumlah permintaan yang kemudian dapat ditentukan sebagai alternatif pola jaringan trayek guna melayani permintaan akan angkutan perdesaan dan di perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, angkutan umum dalam trayek teratur dan tetap harus memiliki rute tetap dan teratur, terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan Penumpang di Terminal atau pada tempat yang ditentukan untuk Angkutan perkotaan dan perdesaan.

Berdasarkan hasil penelitian fenomena yang terjadi pada angkutan umum di wilayah Kabupaten Banyumas terjadi karena adanya kehadiran BRT Trans Banyumas yang melayani rute dalam kota tertentu menjadikan tumpang tindih dengan angkutan perkotaan lainnya.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur di Kabupaten sudah cukup efektif jika berdasarkan indikator kenyamanan, kapasitas, ketepatan waktu dan harga. Harga atau tariff yang ditetapkan tidak merugikan operator serta tidak pula membebani masyarakat pengguna jasa angkutan umum pedesaan maupun perkotaan. Sedangkan berdasarkan indikator tumpang tindih trayek, terjadi tumpang tindih trayek angkutan di wilayah perkotaan yang dilalui oleh rute bus Trans Banyumas.

REFERENCES

- Adhianti, R. A. C., Ronauli, R., & Kezia, L. (2020). Integrasi Antarmoda dengan Penerapan Transit-Oriented Development pada Kawasan Kota Lama Semarang. *Warta Penelitian Perhubungan*, 32(2), 113-124. doi: 10.25104/warlit.v32i2.1525
- Arfin, D. Usman, J. Sudarmi. (2022). Efektivitas Program Kartu Tani Pada Tata Kelola Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik* 3(6), 1758-1768.
- Ashari, M. L dan Hariani, D. (2019). Analisis Efektivitas Program Kartu Tani Di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara. *Journal Of Public Policy And Management* 8(2) DOI: 10.14710/jppmr.v8i2.23711.
- Farhand, A. (2022). Perencanaan Jaringan Trayek Angkutan Umum Pedesaan Di Kabupaten Padang Pariaman, 1 (1). pp. 1-27.
- Habibulloh, H. (2022). Efektivitas Pelayanan BRT Trans Jateng Trayek Terminal Mangkang-Weleri Kabupaten Kendal. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
- Harahap, F. S. (2019). Efektivitas Kebijakan Penggunaan Kendaraan Bermotor Terhadap Siswa/i SMA di Pulau Karimun. *Journal of Law and Policy Transformation* 4(2), 43-70.
- Hariyono, D. W. dan Prawesthi, W. (2015). Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Di Surabaya. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTransLog)* 2(2), 177-190.
- Oriwarda, H. D., I Made Suraharta, I Made Suraharta dan Rahardjo, E. P. (2022)/ Perencanaan Pelayanan Angkutan Pedesaan Dengan Skema Buy The Service Di Kabupaten Banyuwangi. 1 (1). pp. 1-11.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Rakhmatulloh, A. R., Febrian, M. N., Susetyarto, M. B., & Dewi, D. I. K. (2021). The Impact of Bus Trans Semarang Route to Land Prices and Urban Land Sustainability. *Journal of Urban and Environmental Engineering*, 15(2), 126-138. doi: 10.4090/juee.2021.v15n2.126138
- Solecka, K., & Žak, J. (2014). Integration of The Urban Public Transportation System with The Application of Traffic Simulation. *Transportation Research Procedia*, 3, 259-268. doi: 10.1016/j.trpro.2014.10.005.
- Subarto, ATD, Istianto, B. Anwar, A. (2015). *Manajemen Angkutan Umum Transportasi Jalan*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Suhargon, R. (201). Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Angkutan Umum Dalam Menambah Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 4 (2), 426-430.
- Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Nomor 22 Tahun 2009, LN No.96 tahun 2009, TLN No. 5.